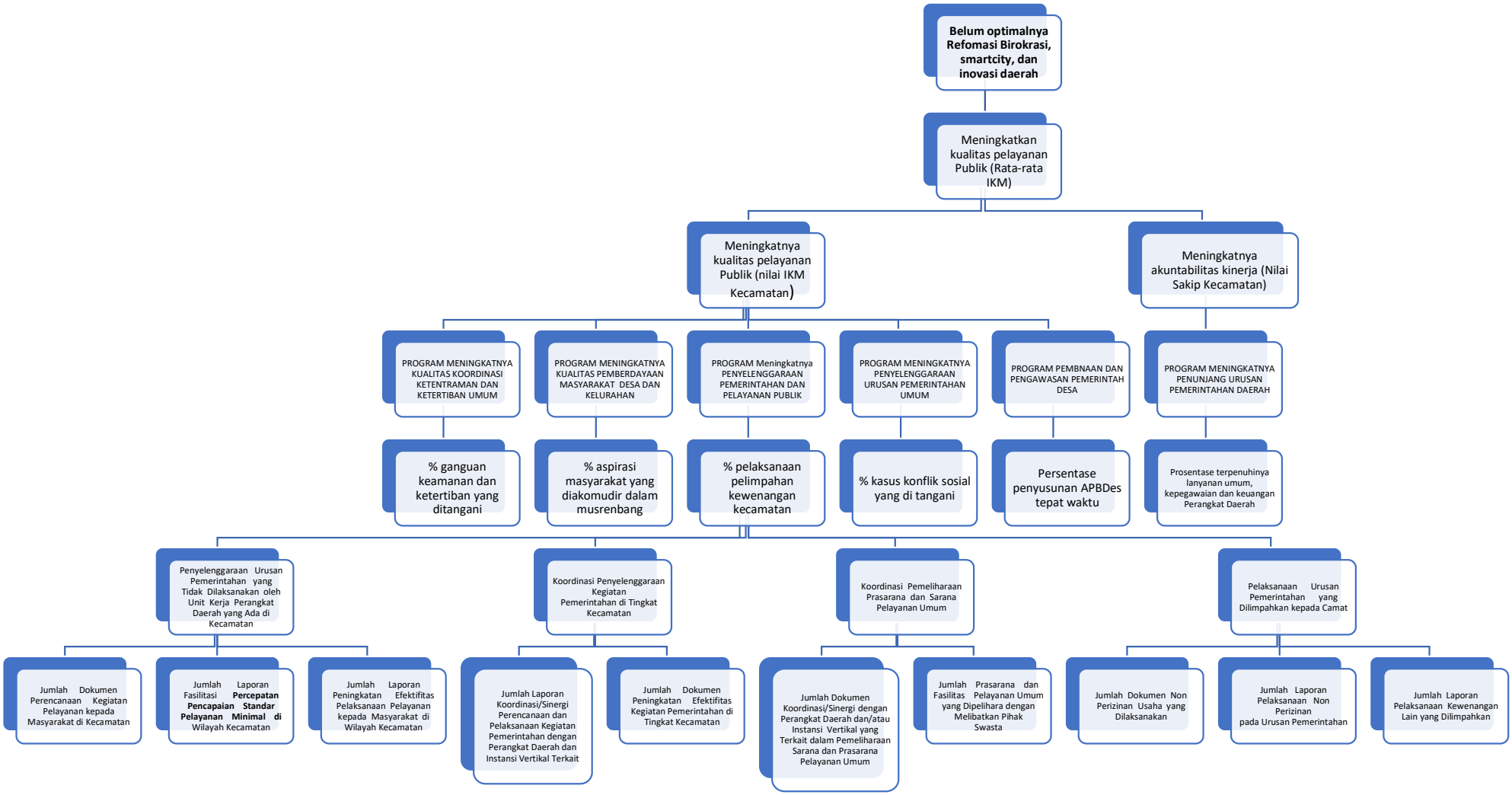
Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, smartcity, dan inovasi daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik (Rata-rata IKM)
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik (nilai IKM Kecamatan)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja (Nilai Sakip Kecamatan)
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM Meningkatnya PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBNAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
PROGRAM MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang
% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
% kasus konflik sosial yang di tangani
Persentase penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

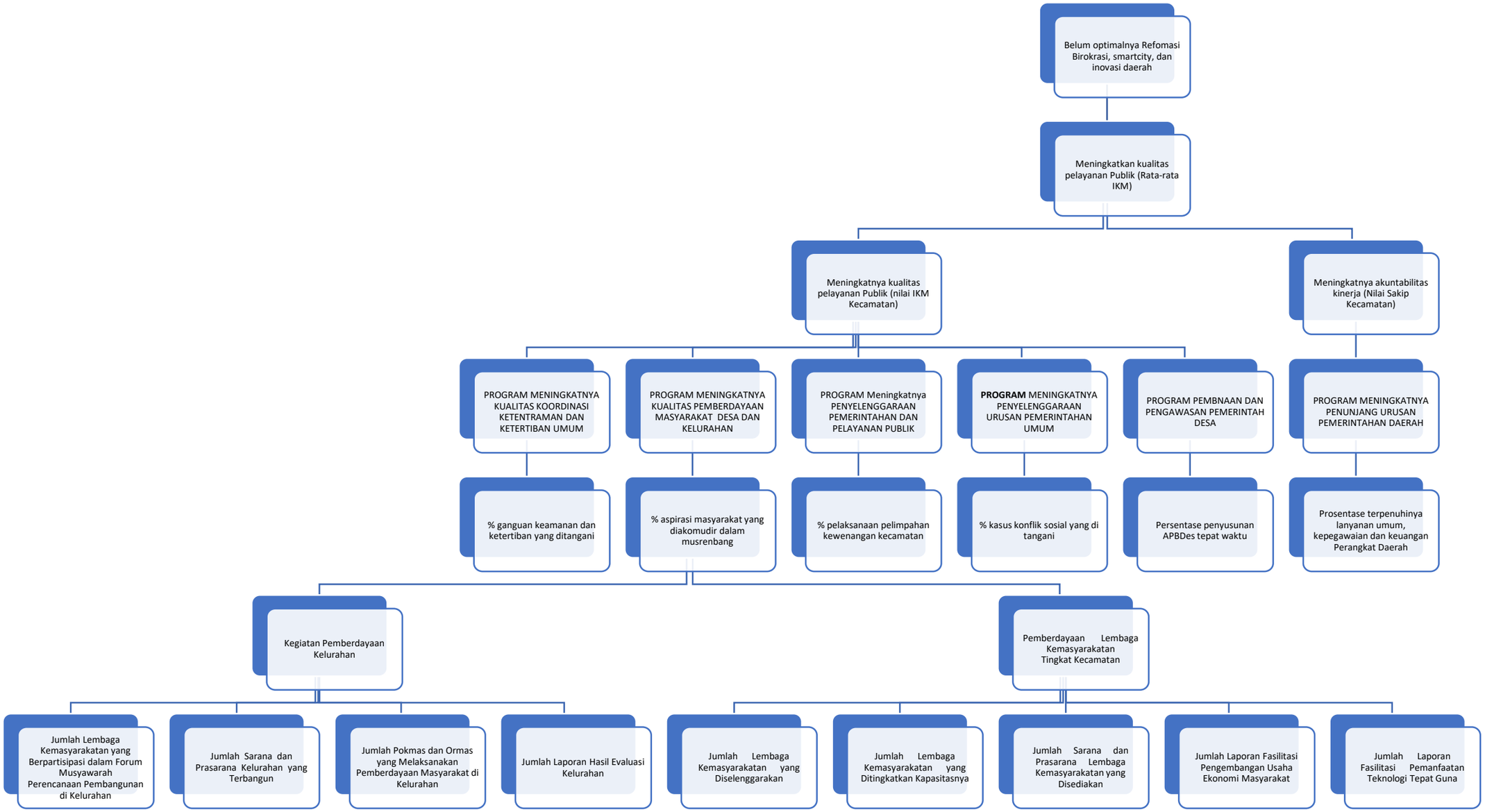
Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, smartcity, dan inovasi daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik (Rata-rata IKM)
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik (nilai IKM Kecamatan)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja (Nilai Sakip Kecamatan)
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM Meningkatnya PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBNAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
PROGRAM MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang
% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
% kasus konflik sosial yang di tangani
Persentase penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

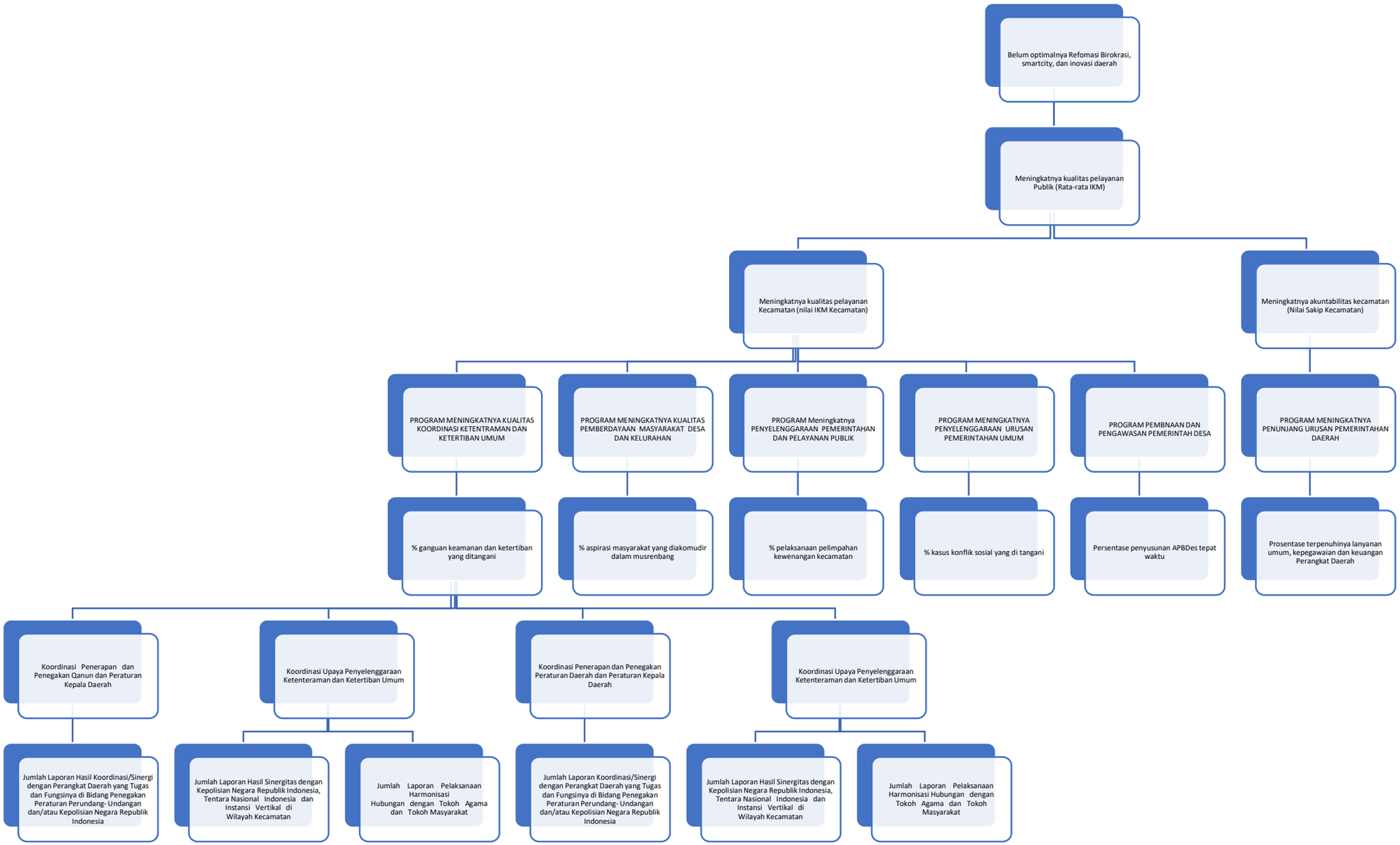
Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, smartcity, dan inovasi daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik (Rata-rata IKM)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan (nilai IKM Kecamatan)
Meningkatnya akuntabilitas kecamatan (Nilai Sakip Kecamatan)
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM Meningkatnya PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBNAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
PROGRAM MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang
% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
% kasus konflik sosial yang di tangani
Persentase penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

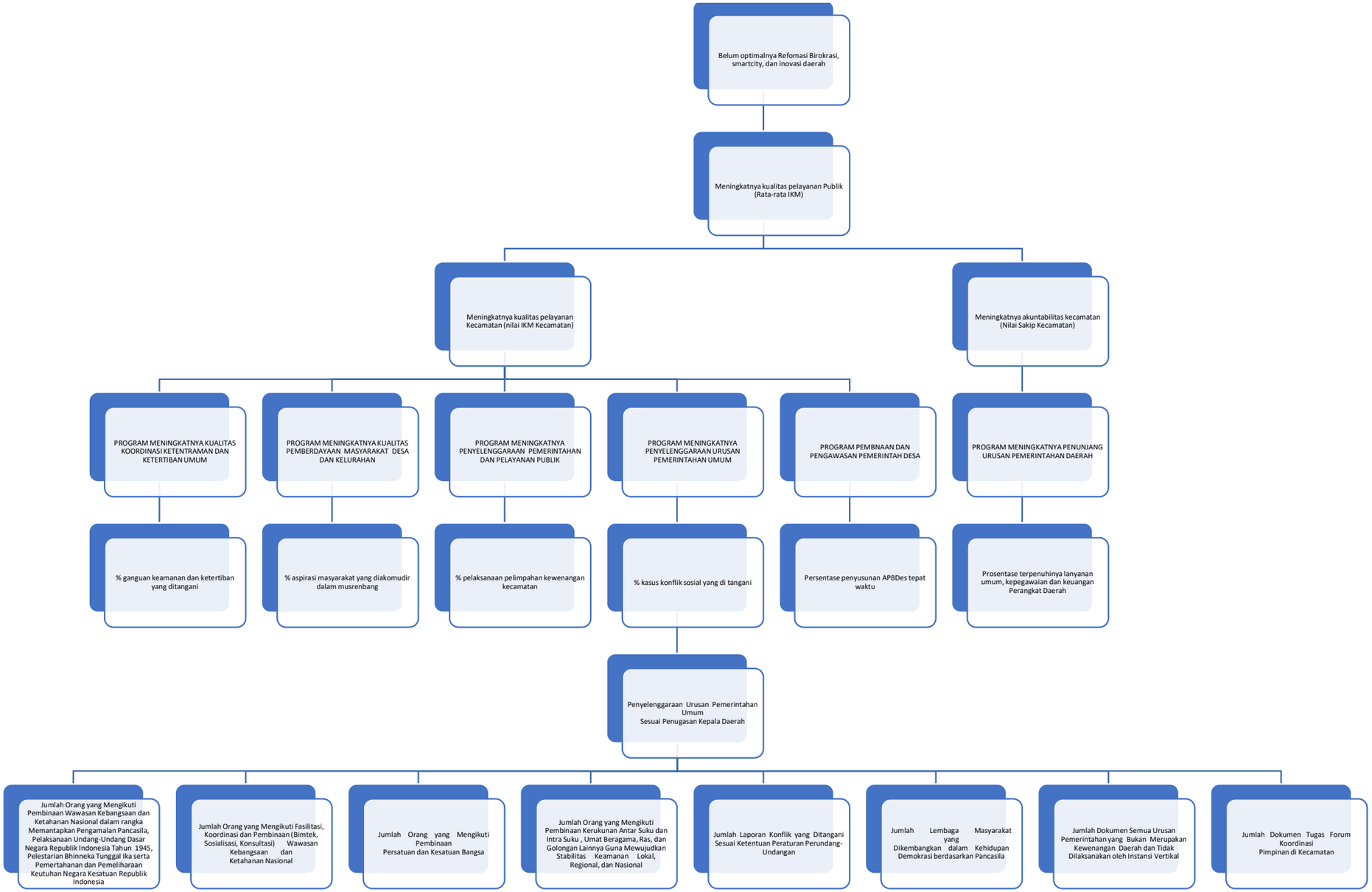
Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, smartcity, dan inovasi daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik (Rata-rata IKM)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan (nilai IKM Kecamatan)
Meningkatnya akuntabilitas kecamatan (Nilai Sakip Kecamatan)
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBNAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
PROGRAM MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang
% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
% kasus konflik sosial yang di tangani
Persentase penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

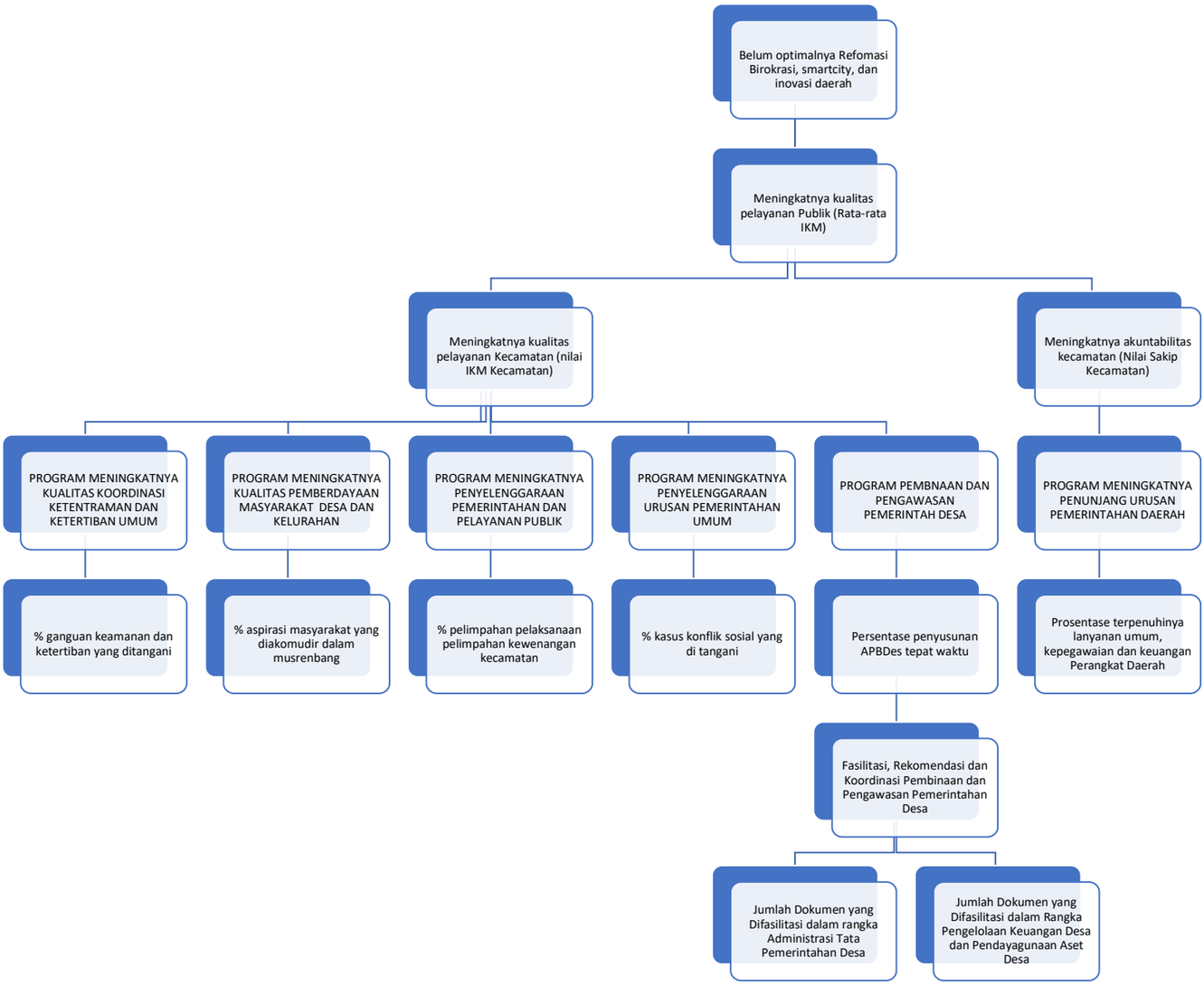
Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, smartcity, dan inovasi daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik (Rata-rata IKM)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan (nilai IKM Kecamatan)
Meningkatnya akuntabilitas kecamatan (Nilai Sakip Kecamatan)
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBNAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
PROGRAM MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang
% pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
% kasus konflik sosial yang di tangani
Persentase penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

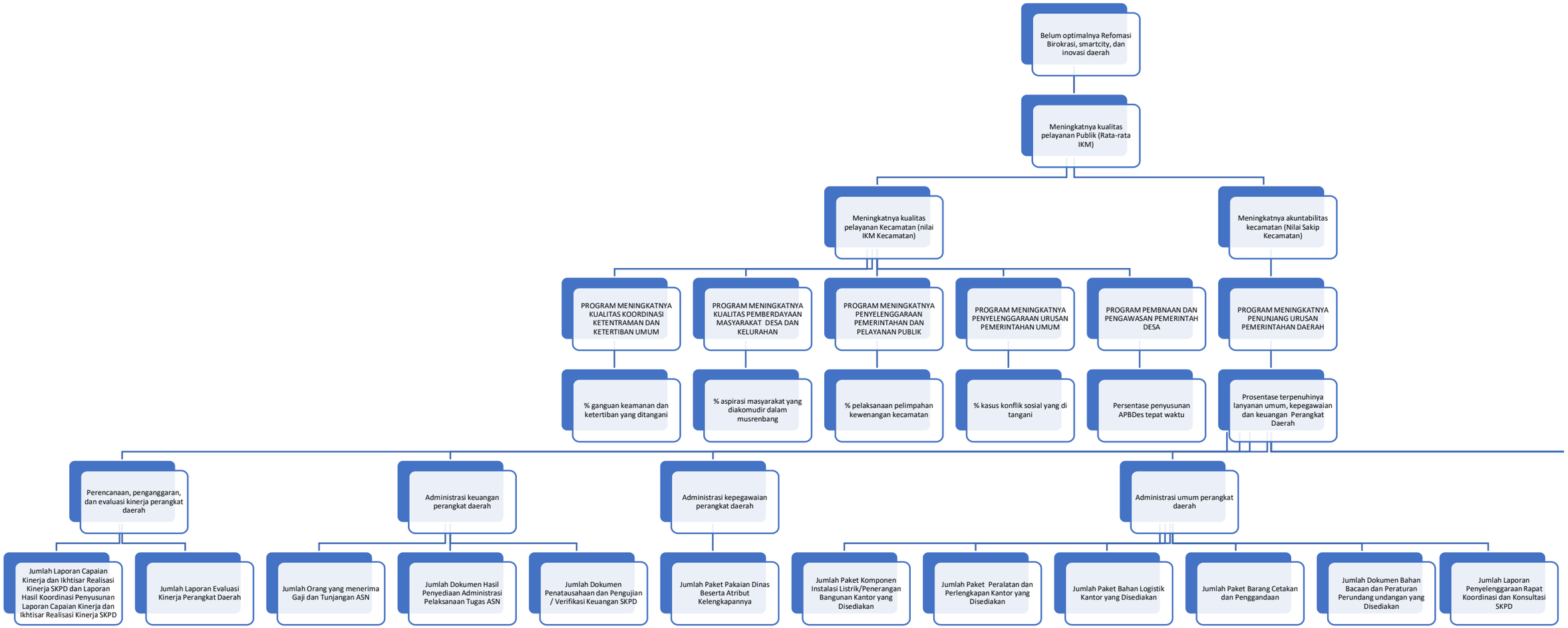
Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, smartcity, dan inovasi daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik (Rata-rata IKM)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan (nilai IKM Kecamatan)
Meningkatnya akuntabilitas kecamatan (Nilai Sakip Kecamatan)
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBNAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
PROGRAM MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang
% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
% kasus konflik sosial yang di tangani
Persentase penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Administrasi keuangan perangkat daerah
Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Administrasi umum perangkat daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

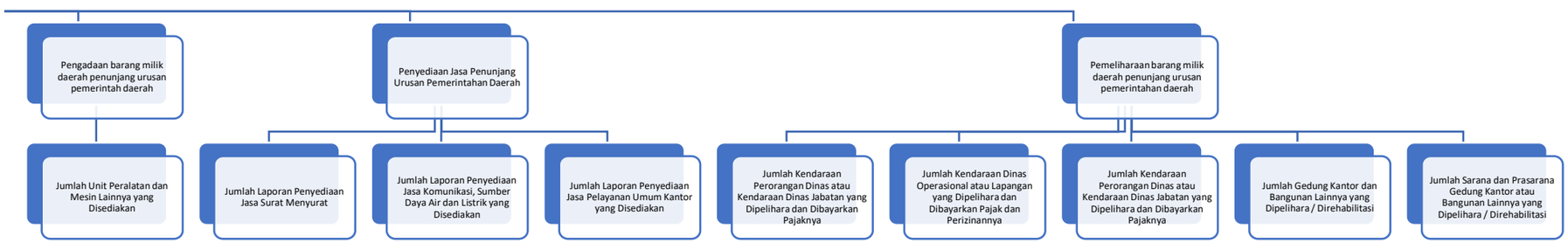
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi